

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan terbesar yang ada di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki penghasilan dibawah rata-rata, sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik seperti pelayanan rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya. Untuk mengurangi dan menanggulangi masalah tersebut pemerintah melakukan berbagai macam program yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat tercukupi. Banyak sekali bentuk dan cara pemerintah dalam mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Seperti halnya melakukan pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan memberdayakan masyarakat.

Banyak bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberdayaan dalam bidang kesehatan, pemberdayaan dalam bidang pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut pemerintah memberikan bantuan dan juga bimbingan kepada masyarakat untuk mengelolanya dan kemudian dapat menjadi peluang usaha serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali oleh pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah juga ikut aktif

dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Pemerintah daerah berupaya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan potensi daerah tersebut. Banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah.

Di tingkat desa, pemerintah desa juga berupaya aktif dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian. Pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dengan adanya pemberdayaan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah di desa Gemaharjo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.

Desa Gemaharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Pacitan yang bisa dikatakan dengan desa yang berkembang. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan mulai berkembangnya desa tersebut serta terdapat berbagai macam fasilitas yang dapat di tempuh masyarakat desa seperti halnya puskesmas dan UGD 24 jam dan lain sebagainya sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota untuk mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu pemerintah desa juga melakukan berbagai macam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan pemberdayaan. Dalam kegiatan pemberdayaan tersebut masyarakat

dibimbing dan di bina untuk mengelola sumber daya, dengan adanya kegiatan tersebut harapannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah desa Gemaharjo melakukan berbagai macam kegiatan pemberdayaan di berbagai bidang seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Salah satu program pemberdayaan di bidang peternakan adalah dengan program pengembangan ternak sapi perah. Program tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat yang tergabung dengan kelompok ternak di desa Gemaharjo. Pemerintah desa melakukan dan memberikan bimbingan serta pembinaan secara berkala kepada masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ternak sapi perah tersebut.

Ternak sapi perah tersebut didapatkan dari bantuan Dinas Pertanian Bidang Peternakan dengan memberikan 30 ekor sapi perah pada tahun 2014. Sapi perah tersebut diberikan kepada masyarakat desa Gemaharjo untuk dikelola. Pemberian bantuan sapi perah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat desa Gemaharjo. Dalam rentan waktu 3 tahun pada tahun 2016 jumlah ternak sapi perah yang dikelola oleh masyarakat desa Gemaharjo mengalami peningkatan. Dari yang awalnya hanya berjumlah 30 ekor sapi sekarang meningkat menjadi 181 ekor sapi perah, dengan jumlah sapi ternak tersebut dapat menghasilkan 18 ribu liter susu/ bulan dan mendapatkan omset dari penjualan susu tersebut mencapai Rp 86 juta per bulan, dari jumlah omset tersebut per orang mendapatkan penghasilan sekitar 7 juta per bulannya

seperti yang tertulis dalam sebuah artikel Tempo.com, (diakses dari nasional.tempo.co). Dari pengembangan ternak sapi perah tersebut Desa Gemaharjo menjadi salah satu Desa Unggulan.

Selain itu sapi perah tersebut diambil susunya untuk kemudian di jual kepada pengepul untuk dijadikan produk susu kemasan. Seperti yang di katakan oleh Wahyu Pujiono selaku Kepala Desa Gemaharjo (Diakses dari nasional.tempo.co), dimana semua susu hasil dari peternakan sapi perah di Desa Gemaharjo sudah memiliki Distributor dari Kabupaten Ponorogo serta sudah terdapat perjanjian kerjasama. Dalam hal ini pemerintah desa Gemaharjo bekerjasama dengan PT Nestle dalam pengelolaan hasil ternak sapi perah berupa susu tersebut. Peran PT Nestle disini adalah sebagai pengepul yang menampung susu-susu segar hasil ternak sapi perah yang dikelola masyarakat. Susu-susu tersebut oleh PT Nestle akan dijadikan sebagai produk minuman susu segar yang akan disebar luaskan ke seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi dan meningkatkan jumlah produksi susu segar serta untuk memenuhi angka konsumsi susu anak-anak di seluruh wilayah Indoneisa. Untuk memenuhi target tersebut pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk mengeola ternak sapi perah tersebut. Dengan begitu produksi susu segar dapat terpenuhi serta target komsumsi susu untuk anak-anak juga dapat mengalami peningkatan. Serta angka kemiskinan juga semakin menurun.

Selain sebagai pengepul susu segar dari hasil ternak sapi perah tersebut, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan PT Nestle adalah mengenai pembagian hasil olahan susu segar hasil dari ternak sapi yang dikelola oleh masyarakat tersebut. Pembagian hasil yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut berdasarkan pada Peraturan Desa No. 8 tahun 2015 tentang pembagian hasil. Bentuk pembagian hasil tersebut berupa pemberian susu gratis untuk masyarakat desa Gemaharjo, yang nantinya susu tersebut akan diolah kembali oleh masyarakat menjadi berbagai macam olahan susu seperti permen susu dan susu segar dengan berbagai macam rasa serta olahan susu lainnya. Kemudian olahan tersebut akan dijual kembali oleh masyarakat.

Mayoritas masyarakat Desa Gemaharjo sebelum melakukan pengembangan ternak sapi perah, mereka hanya bergantung pada hasil pertanian saja. Mereka tidak memiliki kegiatan lain untuk menambah penghasilan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat tawaran yang diberikan oleh Dinas Peternakan untuk melakukan pengembangan ternak sapi perah. Menanggapi hal tersebut kemudian Kepala Desa Gemaharjo melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usulan dari Dinas Peternakan tersebut kepada kelompok Tani Desa Gemaharjo, Kemudian usulan tersebut ditanggapi dengan antusias oleh masyarakat. Anggota kelompok Tani tersebut dengan senang hati untuk mencoba membudidayakan atau mengembangkan ternak sapi perah. Bahkan mereka sangat bersemangat dalam rencana melakukan budidaya tersebut. Selanjutnya Kepala Desa Gemaharjo mengirimkan perwakilan dari kelompok Tani tersebut untuk

melakukan studi banding ke Kabupaten Ponorogo, dikarenakan di Ponorogo terdapat terdapat peternak sapi perah yang sudah berhasil dan sukses dalam pengembangan peternakan tersebut. (Diakses dari pacitanku.com).

Kemudian Setelah melakukan studi banding ke Kabupaten Ponorogo serta mendapat bantuan sapi perah dari Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan sekitar 30 ekor sapi perah pada tahun 2014 untuk dua kelompok dari 7 Kelompok Tani, yakni Kelompok Tani yang mengembangkan sapi perah di Dusun Kaligondang dan Dusun Gemah, seperti yang tertulis dalam artikel dalam website Desa Gemaharjo, (Diakses dari gemaharjo.kabpacitan.id). Pemerintah Desa Gemaharjo kemudian mulai membangun sebuah ruang pendingin yang digunakan untuk tempat menampung sementara susu-susu segar yang dikumpulkan oleh peternak agar dapat bertahan lama. Kepala Desa juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sebagai sarana pendukung dalam pengembangan peternakan.

Menurut dari Bapak Wahyu Pujiono selaku Kepala Desa Gemaharjo, Pemerintah Desa berupaya untuk mendapatkan distributor atau pemasok untuk memasarkan atau menjual produk susu dari Desa Gemaharjo. Dalam pelaksanaannya mencari distributor tidak terlalu sulit dilakukan, hal tersebut dikarenakan lokasi atau letak dari Desa Gemaharjo yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu faktor pendukung dalam pemasaran. Ditambah dengan desa yang memiliki luas sekitar 1.448 hektare tersebut memiliki subterminal bus yang memiliki fasilitas seperti kios dan warung. Warung tersebut buka 24 jam sehingga memudahkan dalam pemasaran.

Adanya pengembangan ternak sapi perah tersebut memberikan dampak yang baik, dengan semakin cepat perkembangan peternakan tersebut yang kemudian menjadikan angka kemiskinan di Desa Gemaharjo semakin menurun. Dimana pada tahun 2014 jumlah keluarga miskin sekitar 480 keluarga kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 430 keluarga. Menurut Tumadi selaku Ketua Kelompok Tani Gemah Ripah 4 Desa Gemaharjo, dengan mengikuti budidaya atau pengembangan ternak sapi perah tersebut penghasilan yang diterima setiap bulan menjadi meningkat. Ia memiliki atau mendapatkan omzet sekitar Rp. 7.000.000,00 per bulannya. Padahal sebelumnya ia mengatakan bahwa harus menunggu mendapatkan selama 4 bulan untuk mendapatkan penghasilan dari hasil panen bertani. (Diakses dari pacitanku.com).

Pada pertengahan tahun 2014 pada awal mula pelaksanaan pengembangan ternak sapi perah di Desa Gemaharjo tersebut memiliki jumlah sapi 30 ekor, kemudian pada tahun 2016 Dinas Peternakan memberikan bantuan tambahan sapi perah sejumlah 15 ekor sapi untuk Kelompok Tani Gemah Ripah 4 di Dusun Gemah. Kemudian pada awal tahun 2017, jumlah populasi ternak sapi perah di Desa Gemaharjo semakin meningkat dan bertambah menjadi 205 ekor sapi. Banyak dari Peternak yang mencari bibit sapi perah secara swadaya. (Nanang, Diakses dari gemaharjo.kabpacitan.id)

Selain itu, untuk hasil produksi dari pengembangan ternak sapi perah tersebut, para peternak pada awalnya mendapatkan jumlah hasil produksi susu yang sedikit, hal tersebut dikarenakan kondisi sapi yang tidak bisa

mengandung secara bersamaan, sehingga produksi susu segar juga masih sedikit. Akan tetapi pada awal tahun 2017 hasil produksi susu segar dari jumlah produksi per ekor sapi rata-rata menghasilkan 15 kg perhari. Dari data peternak sapi se Desa Gemaharjo di peroleh sebanyak 19 ton per bulan dengan harga pada bulan Januari sebesar Rp. 5.050,- per kg, yang kemudian hasil dari produksi susu segar tersebut langsung di tampung oleh PT. NESTLE. (Nanang, Diakses gemaharjo.kabpacitan.id)

Melakukan pengembangan ternak sapi perah tidak segampang yang dibayangkan. Hal tersebut dikarenakan banyak kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan diantaranya yaitu perawatan kesehatan sapi yang secara rutin dilakukan dan harus diperhatikan selama 24 jam. Selain itu ia juga berharap bahwa Dinas terkait memberikan bimbingan secara rutin dengan memberikan pendampingan Petugas Kesehatan Khusus Hewan Sapi Perah, karena selama ini belum ada Petugas Kesehatan Hewan Khusus Sapi Perah di Kabupaten Pacitan. Sehingga para peternak sapi perah harus mencari Petugas Kesehatan Hewan dari daerah Tulungagung serta juga mengharapkan, perlu adanya tambahan bantuan bibit sapi perah dikarenakan masih terdapat peternak yang belum mampu membeli bibit sapi perah sendiri. (Diakses dari gemaharjo.kabpacitan.id).

Kemudian menanggapi hal tersebut pada tanggal 11 November 2017 Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan memberikan bantuan bibit sapi perah kepada Kelompok Tani Gemah Ripah 7 yang berada di Dusun Kaligondang sebanyak 16 ekor sapi perah untuk menambah jumlah ternak seperti yang

tertulis dalam artikel di website Desa Gemaharjo. (Diakses dari gemaharjo.sideka.id).

Beberapa pemaparan diatas dapat dilihat bahwa dalam keberhasilan dan kesuksesan pengembangan peternakan sapi perah Di Desa Gemaharjo tersebut tidak terlepas dari peran masing-masing pihak baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam hubungan kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan. Dengan adanya kolaborasi tersebut implementasi atau pelaksanaan dari program pengembangan ternak sapi perah tersebut dapat berjalan dengan baik serta dengan adanya pengembangan tersebut masyarakat mendapatkan penghasilan tetap perbulan dengan omzet yang cukup besar serta dapat menurunkan angka tingkat kemiskinan di Desa Gemaharjo. Walaupun demikian masih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh peternak dalam menjalankan usaha peternakan sapi perah tersebut.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk mengetahui bentuk dan proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Gemaharjo dengan PT Nestle serta melibatkan masyarakat dalam program pengembangan ternak sapi perah dan peran dari setiap masing-masing pihak dalam keberhasilan pengembangan peternakan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui dampak dari kolaborasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Gemaharjo sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan perekonomian.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola program pengembangan ternak sapi perah berbasis *collaborative governance* di desa Gemaharjo Kabupaten Pacitan tahun 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola program pengembangan ternak sapi perah berbasis *collaborative governance* di Desa Gemaharjo Kabupaten Pacitan tahun 2017

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi pihak terkait untuk menambah informasi dan untuk mengembangkan keilmuaan tentang bentuk kolaborasi pemerintah dalam pengembangan ternak sapi perah di Desa Gemaharjo dan juga di Kabupaten Pacitan Sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pacitan serta pemerintah desa Gemaharjo untuk evaluasi program pemerintah.
- b) Untuk bahan referensi masyarakat Desa Gemaharjo dalam meningkatkan kinerja pengelolaan ternak sapi perah.
- c) Untuk bahan referensi yang dapat digunakan dalam penelitian yang membahas mengenai kolaborasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai Tata Kelola Program Pengembangan Ternak Sapi Perah Berbasis *Collaborative Governance* Di Desa Gemaharjo Kabupaten Pacitan. Seperti penelitian yang ditulis oleh Harmawan (2016) yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi *Ethno Carnival*”, dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses terjalannya *Collaborative Governance* dalam program pengembangan nilai budaya daerah melalui banyuwangi *Ethno Carnival* tersebut ialah pada mulanya di buat oleh Bupati Banyuwangi yang kemudian mengamanahkan tugas tersebut untuk dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan kerjasama dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dan Dewan Kesenian Blambangan.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut bentuk kolaborasi yang dilakukan terdapat dua proses atau langkah yaitu seperti proses melalui tatap muka atau bertemu secara langsung untuk membahas mengenai kegiatan tersebut. Dalam proses tatap muka tersebut terdapat beberapa pembahasan, kemudian dari pembahasan tersebut mendapatkan kesepakatan serta kepercayaan dan juga komitmen bersama, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang baik agar

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Hubungan yang terjalin antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dengan Manajemen *Jember Fashion Carnival* dan juga Dewan Kesenian Blambangan tersebut berlanjut hingga tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 hingga tahun 2014 pada pelaksanaan kegiatan BEC fungsi dari Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai konsultan digantikan oleh Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi. Hasil keputusan tersebut menghasilkan beberapa tahapan mengenai jalannya kegiatan tersebut.

Terdapat penelitian yang relevan lainnya mengenai *Collaborative Governance* yaitu penelitian yang ditulis oleh Dewi (2012) yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo) “ dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahawa dalam melakukan pengembangan industri kecil tersebut melakukan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak yaitu antara pihak Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Bank Jatim, Yayasan Reyog, pengrajin dan seniman dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan serta kendala yang dialami oleh kerajinan reyog, upaya yang dilakukan dalam kolaborasi tersebut yaitu berupa melakukan kegiatan penyediaan modal usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas Industri

Perdagangan Koperasi dan UKM dan Bank Jatim kepada pihak pengrajin reyog.

Kemudian melakukan sosialisasi bahan baku yang dilakukan oleh Dinas Industri Perdagangan dan UKM dengan pengrajin, sosialisasi tersebut bertujuan untuk mencari solusi permasalahan dimana bahan baku kerajinan reyog yang mengalami kelangkaan serta dilindungi. Selanjutnya yaitu mengadakan festival reyog nasional yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Yayasan Reyog dan Seniman, dengan adanya festival reyog nasional tersebut diharapkan kesenian reyog dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang baik bagi sumber pemasukan yayasan reyog dan seniman serta para pengrajin. Kemudian menyelenggarakan pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan para pengrajin, pameran tersebut bertujuan untuk mengenalkan kesenian reyog kepada masyarakat luas dengan cara mengikutsertakan hasil kerajinan dalam sebuah pameran.

Dalam proses kolaborasi tersebut tentu saja terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya seperti kurangnya komitmen dari pemerintah serta kurangnya kepercayaan dalam pengelolaan uang pinjaman dalam penyediaan modal usaha. Kemudian keadaan bahan baku yang langka dan dilindungi juga menjadi penghambat dikarenakan bahan untuk membuat kerajinan reyog ialah menggunakan bulu burung merak.

Oleh karena itu dalam proses pembuatan kerajinan reyog menjadi terhambat. Selanjutnya dalam pelaksanaan festival reyog nasional juga pameran mengalami kendala dimana dalam pembagian tanggung jawab masih belum jelas serta masih kurangnya kepercayaan pengrajin terhadap dinas untuk mengelola hasil kerajinan tersebut.

Selain itu terdapat penelitian lainnya mengenai *Collaborative Governace* yaitu yang ditulis oleh Irawan (2017) yang berjudul ”*COLLABORATIVE GOVERNANCE (STUDI DESKRIPTIF PROSES PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA SURABAYA*”. Dalam penelitian tersebut irawan menjelaskan mengenai proses kolaborasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Kota surabaya dengan melalui tiga langkah atau tahapan diantaranya yaitu *Identifying obstacles and opportunities, Debating strategies for influence* kemudian *Planning Collaborative Actions* . Akan tetapi proses kolaborasi melalui tiga tahapn tersebut belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi atau keterlibatan para stakeholders dalam kolaborasi serta kurangnya ketersediaan sumber financial atau keuangan, sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan kolaborasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara di surabaya tersebut tidak optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas ialah dimana pembahasan penelitian ini yakni ingin mengetahui bagaimana tata kelola kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan

masyarakat dalam menjalankan program pengembangan ternak sapi perah di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para pihak sehingga memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian bagaimana kolaborasi tersebut memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian ini membahas mengenai peran dari setiap masing-masing pihak di dalam proses kolaborasi baik dari pihak pemerintah, swasta maupun dari pihak masyarakat dalam menjalankan pengembangan ternak sapi perah di Desa Gemaharjo. Kemudian bagaimana awal mula pemerintah memutuskan untuk melakukan kolaborasi dalam pengembangan ternak sapi perah tersebut. Selain itu kendala-kendala apa saja yang di alami oleh masyarakat dalam mengelola ternak sapi perah tersebut, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan sehingga pengembangan ternak sapi perah tersebut semakin meningkat setiap tahunnya dan berdampak baik bagi penghasilan masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

1. Governance

Menurut (Mardiasmo,2004:17) dalam (Bawono,2009), dimana definisikan dari *Governance* dapat juga berarti sebagai cara atau metode dalam mengelola masalah-masalah yang menyangkut urusan publik.

Selain itu menurut *United Nation Deveopment Program* (UNDP) dalam (Bawono,2009), *Governance* ialah “ *The Exercise of Political, Economic and Administrative Authority to Manage a Nation’s Affair At All Levels* “, (Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan).

Berdasarkan definisi dari UNDP tersebut *Governance* memiliki tiga kaki (Sedarmayanti,2003:4) dalam (Bawono,2009), meliputi:

- a. *Economic Governace*, yang mencakup proses pembuatan keputusan yang memberikan sarana terhadap ekuitas, kemiskinan dan kualitas hidup.
- b. *Political Governance* ialah sebuah proses keputusan untuk merumuskan suatu kebijakan.
- c. *Administrative Governnace* ialah sistem pelaksanaan atau penerapan proses kebijakan.

Maka dari itu terdapat tiga ranah intuisi dari *governance* yaitu seperti *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta), dan *society* (masyarakat) yang saling berhubungan satu sama lain dan menjalankan fungsinya masing-masing, (Sadarmayanti,2003:5) dalam (Bawono,2009).

Terdapat beberapa definisi mengenai *governance*, seperti yang dikemukakan oleh cheema (Keban, 2008:8) dalam (Dewi,2012), dimana *governance* ialah sebuah bentuk nilai, kebijakan serta sebuah organisasi yang menangani suatu hal yang menyangkut urusan ekonomi, politik dan

sosial, dimana urusan tersebut dikelola dengan melibatkan adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah serta swasta.

Terdapat pendapat lain mengenai deefinisi dari *governance* seperti yang dikemukakan oleh Kapucu, Naim; Farhod Yuldashev, dan Erlan Bakiev,(2009:45) dalam (Dewi,2012), yang menyatakan bahwa *Governance is the process of decision making with the involvement of varieties of state and non-state actor. Governance guides the process that influences decisions and procedures within the private, public, and civic sectors.* (*Governanace* ialah proses dimana dalam melakukan pengambilan serta pembuatan keputusan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan pihak non pemerintah. *Governance* membimbing proses yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan serta prosedur dalam bidang swasta, masyarakat serta sipil).

Pendapat lain mengenai *Governance*, seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2005:79-81) dalam (Dewi,2012), bahwa pengertian dari *governance* ialah mengacu pada sebuah kekuasaan yang tidak lagi hanya sekedar dimiliki atau hanya menjadi urusan pemerintah, melainkan lebih mementingkan pada pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan yang dilakukan bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, pihak-pihak swasta serta masyarakat.

Selain itu Dwiyanto dalam (Dewi,2012), juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa dimensi penting dalam *governance* dimana dalam dimensi penting pertama ialah dimensi kelembagaan, dimana dimensi

kelembagaan tersebut *governance* ialah sebuah sistem dimana didalamnya melibatkan berbagai pihak (*multistakeholders*), berbagai pihak atau *multistakeholders* tersebut meliputi antara lain pemerintah serta bisa juga dari luar pemerintah dalam melakukan pelaksanaan berbagai macam kegiatan untuk memahami permasalahan dan memenuhi kebutuhan publik. Dimensi penting yang kedua ialah nilai yang menjadi landasan dasar dalam penerapan kekuasaan. Nilai-nilai administrasi publik yang lama seperti efisiensi dan efektifitas telah berpindah menjadi nilai keadilan sosial, kemanusiaan dan kebebasan. Selanjutnya dimensi yang ketiga ialah dimensi dimana proses yang mencoba menjelaskan bagaimana respon dari berbagai unsur dan lembaga pemerintah terhadap berbagai macam masalah-masalah publik yang timbul di lingkungannya.

Dari ketiga dimensi tersebut dapat diartikan bahwa dalam *governance* melibatkan banyak unsur atau berbagai pihak dalam proses merumuskan dan pelaksanaan serta penerapan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan serta dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama.

2. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dengan melibatkan masyarakat serta pihak-pihak swasta dalam pembuatan keputusan serta pelaksanaannya secara langsung dengan proses musyawarah yang bertujuan untuk terlaksananya program dan kebijakan secara cepat (Ansel dan Gash (2017) dalam (Zaenuri, 2016).

Selain itu terdapat pendapat lain mengenai *Collaborative Governance* yaitu menurut Agranoff & McGuire (2003), ” *in particular, collaborative Governance has put much emphasis on voluntary collaboration and horizontal relationships among multisectoral participants, since demands from clients often transcend the capacity and role of a single public organization, and require interaction among a wide range of organizations that are linked and engaged in public activities. Collaboration is necessary to enable governance to be structured so as to effectively meet the increasing demand that arises from managing across governmental, organizational and sectoral boundaries* ” (secara khusus, collaborative governance telah memberikan banyak penegasan pada kolaborasi sukarela dan hubungan secara horizontal antara beberapa partisipan multisektoral, dikarenakan tuntutan dari konsumen sering melampaui kapasitas atau kemampuan dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan hubungan di antara berbagai macam organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi dibutuhkan untuk memudahkan agar pemerintahan dapat menjadi lebih terstruktur sehingga menjadi lebih efektif dalam memenuhi peningkatan permintaan yang muncul dari pengelolaan lintas pemerintahan, batas sectoral serta organisasi).

Sedangkan definisi menurut Culpepper dalam (Dewi,2012), “ Collaborative governance is the availability of institution that promote interaction among governmental and non-governmental actors, without state actors monopolizing problem definition, goal setting or methods of

implementation. (Collaborative governance merupakan ketersediaan institusi yang menawarkan hubungan antara pemerintah dengan actor non pemerintah, tanpa aktor-aktor negara tersebut memonopoli pengartian masalah, penetapan tujuan atau metode pelaksanaan). Dalam konsep *Collaborative Governance* memuat keterlibatan beberapa institusi-institusi yang sedang memulai usaha kerjasama, serta apa gagasan dari setiap masing-masing institusi dalam menentukan atau mengartikan tujuan, mengukur hasil, menghasilkan perubahan dan lain sebagainya (Donahue dalam (Mutiarawati,2017)).

Selain itu menurut Ansel dan Gash dalam (Mutiarawati,2017), terdapat beberapa hal mengenai pentingnya melakukan *Collaborative Governance* yaitu diantaranya, yang pertama adanya kegagalan penerapan atau pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan terdapat berbagai macam kendala-kendala yang mengakibatkan penerapan kebijakan tersebut menjadi tidak maksimal sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Kedua, adanya ketidaksanggupan dari pihak-pihak terkait terutama karena pemisahan kekuasaan pemerintah untuk menggunakan wilayah-wilayah institusi yang lain untuk menghambat keputusan. Ketiga mobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Keempat Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Dalam (Mutiarawati,2017), dijelaskan bahwa selain beberapa alasan tersebut, timbulnya serta dikembangkannya *Collaborative Governance* merupakan sebuah alternatif atau opsi bagi :

- a) Adanya pemikiran-pemikiran yang menjadi semakin luas mengenai keberagaman pihak-pihak atau kelompok-kelompok kepentingan.
- b) Adanya kegagalan-kegagalan dalam akuntabilitas manajemen serta kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam *Collaborative Governance* terdapat beberapa indikator keberhasilan sebuah kolaborasi menurut DeSeve (2007) yaitu seperti:

a. Networked Structure (Struktur Jaringan)

Dalam *Networked Structure* tersebut menjelaskan sebuah konsep mengenai suatu keterikatan antara suatu bagian dengan bagian yang lain yang kemudian bersatu secara bersama-sama dan menggambarkan nilai-nilai fisik dari jaringan yang ditangani. Seperti yang dikemukakan oleh Milward dan Provan dalam (Mutiarawati,2017), terdapat tiga bentuk kategori struktur jaringan, diantaranya:

1. Self Governance (Pemerintahan Sendiri)

Dalam bentuk struktur ini tidak memiliki entitas administratif akan tetapi masing-masing pihak atau *stakeholders* ikut serta dalam jaringan serta manajemen yang dilakukan oleh semua anggota. Bentuk struktur tersebut memiliki keunggulan seperti semua pihak atau *stakeholders* dapat ikut serta secara aktif, memiliki sebuah komitmen dan juga dapat dengan mudah membentuk sebuah jaringan. Bentuk struktur tersebut juga memiliki kelemahan seperti kurang efisien serta dalam pembuatan keputusan lebih terdesentralisir, oleh karena itu sangat sulit untuk mencapai kesepakatan

bersama. Sebaiknya mengurangi atau tidak terlalu banyak melibatkan pihak-pihak atau *stakeholders* agar dapat mempermudah dalam komunikasi serta peninjauan secara lebih mendalam.

2. *Lead Organization* (Memimpin Organisasi)

Bentuk struktur ini memiliki entitas administratif sebagai anggota jaringan atau penyedia pelayanan. Dalam struktur ini lebih mengarah pada sentralisasi. Selain itu kelebihan yang dimiliki ialah lebih efisien serta arah atau tujuan dari jaringan lebih jelas. Bentuk ini juga memiliki kelemahan seperti adanya kekuasaan yang mendominasi dari *lead organization* serta komitmen yang dimiliki anggota yang tergabung dalam organisasi masih kurang. Anggota yang dibutuhkan dalam jaringan ini sebaiknya melibatkan banyak anggota agar pelaksanaannya lebih optimal. Tidak boleh membentuk kedudukan atau strata dalam jaringan, struktur jaringan atau semua elemen menjadi satu kesatuan dalam proses organisasi untuk mencapai tujuan bersama serta harus sejajar mungkin. Semua anggota memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab serta otoritas yang sama, dan memiliki kesempatan dalam memberikan kemudahan akses pelayanan dalam mencapai tujuan bersama (Jones dalam (Mutiarawati,2017)).

3. *Network Administrative Organization* (Administrasi Jaringan Organisasi)

Struktur ini memiliki entitas administratif secara jelas untuk menjalankan sebuah jaringan dan bukan sebagai penyedia layanan. Dalam bentuk struktur ini tidak memiliki hirarki atau setiap pihak tidak ada yang mendominasi.

b. *Commitment To A Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Komitmen yang dimaksud disini ialah mengarah pada apa yang menjadi latar belakang atau sebab sebuah jaringan itu harus ada, hal tersebut dikarenakan komitmen serta perhatian dalam mencapai tujuan-tujuan yang agar hasilnya lebih baik.

c. *Trust Among The Participants* (Adanya kepercayaan antar peserta)

Adanya kepercayaan yang timbul diantara para peserta, hal tersebut didasari adanya hubungan secara profesional atau sosial. Dimana para partisipan memberikan kepercayaan mengenai informasi-informasi atau usaha yang dilakukan pihak lain atau *stakeholders* dalam sebuah jaringan organisasi agar dapat mencapai tujuan bersama.

d. *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola)

Dalam tata kelola *governance* terdapat beberapa kejelasan yaitu diantaranya:

1. *Boundary* dan *exclusivity*

Dalam *Boundary* (batas) dan *exclusivity* (kekhususan) ini menjelaskan mengenai siapa yang masuk dalam anggota jaringan serta siapa yang tidak termasuk dalam anggota jaringan dalam proses kolaborasi.

2. *Rules* (Aturan)

Dalam aturan-aturan tersebut menjelaskan bahwa adanya batasan-batasan sikap yang dilakukan anggota beserta sangsi yang akan diterima apabila terdapat anggota yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai

dengan aturan yang telah disetujui secara bersama-sama, sanksi tersebut berupa dapat dikeluarkan dari jaringan. Terdapat peraturan yang jelas mengenai hal apa saja yang seharusnya dilakukan serta batasan-batasan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan atau dilanggar.

e. *Access To Authority* (akses terhadap kewenangan)

Dimana adanya tolak ukur dalam ketentuan langkah-langkah yang jelas yang dapat diterima secara menyeluruh.

f. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian dalam akuntabilitas / responsibilitas)

Dalam berbagi pengaturan, penyelenggaraan serta manajemen dilakukan secara bersama-sama serta pembagian dalam beberapa pembuatan keputusan dengan seluruh anggota dalam kolaborasi atau jaringan, dimana hal tersebut melakukan pembagian dalam tanggung jawab dan dilakukan secara bersama-sama agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

g. *Information Sharing* (bertukar informasi)

Para anggota jaringan dapat dengan mudah dalam mendapatkan atau bertukar informasi. Selain itu terdapat perlindungan *privacy* (identitas pribadi seseorang akan dijaga kerahasiaannya) serta adanya keterbatasan mengakses informasi yang diperuntukan kepada yang tidak termasuk sebagai anggota selama hal tersebut bisa diterima oleh semua pihak.

h. *Access To Resources* (Mengakses sumberdaya)

Tersedianya berbagai macam sumber seperti sumber *financial* (keuangan), manusia, teknis serta berbagai sumberdaya lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan agar dapat mencapai tujuan kolaborasi atau jaringan yang dilakukan secara bersama-sama.

Selain adanya indikator keberhasilan dalam Collaborative Governance terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan sehingga mengakibatkan hasil kolaborasi tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Salah satu kendala dalam kolaborasi ialah kurangnya partisipasi aktif dari berbagai pihak atau *stakeholders*. Dalam Collaborative Governance partisipasi dari setiap pihak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempermudah saat implementasi kebijakan di lapangan. Maka dari itu apabila para *stakeholders* tidak memberikan partisipasinya secara aktif maka hal tersebut akan menghambat dan menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penghambat dalam *Collaborative Governance* seperti halnya menurut *Government of Canada*, 2008 dalam (Dewi,2012), faktor-faktor tersebut diantaranya:

a) Budaya

Mengenai faktor budaya yang dapat menghambat dalam Collaborative Governance ialah adanya budaya ketergantungan terhadap aturan atau prosedur serta tidak mau melakukan inovasi dan mengambil resiko. Adanya

ketergantungan terhadap prosedur secara berlebihan akan menimbulkan terhambatnya proses kolaborasi serta tidak adanya kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi, sehingga pelaksanaan kolaborasi menjadi kurang efektif. Selain itu masih dipertahankannya budaya ‘*top down*’ oleh pemerintah dimana pemerintah mendominasi dalam proses kolaborasi (Sudarmo dalam (Dewi,2012)).

b) Institusi-institusi

Dalam *Collaborative Governance* institusi-institusi juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan, hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan menerapkan struktur kekuasaan yang dilakukan oleh institusi kepada institusi-institusi yang lainnya. Adanya pola kekuasaan secara vertikal sehingga akuntabilitas serta arah kebijakannya juga menjadi vertikal.

c) Politik

Faktor politik juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat dalam proses *Collaborative Governance*, dimana hal tersebut dikarenakan kurangnya inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan politik yang rumit dan bertentangan. Selain itu faktor lain yang juga bisa menjadi penghambat ialah adanya perubahan kesepakatan serta perbedaan kepentingan para

stakeholders yang terlibat, dimana kesepakatan kerjasama yang sudah disetujui bersama tersebut menjadi berubah akibat timbulnya kepentingan baru dari para *stakeholders* (Sudarmo dalam (Dewi,2012).

3. Program

Sebuah program tidak terlepas keterkaitannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah diwujudkan atau dilaksanakan dengan berupa program-program yang direncanakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di suatu daerah. Menurut Jones (1984) dalam Shalfiah (2017), yang mengemukakan bahwa program merupakan sebuah cara atau langkah yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan. Program merupakan sebuah produk yang dihasilkan melalui pengambilan keputusan kebijakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

1.7 Definisi Konseptual

1. *Governance* adalah sebuah cara dalam pemerintahan dimana dalam prosesnya tidak hanya melibatkan pemerintah saja dalam menangani urusan ekonomi politik, sosial serta dalam pengambilan dan pembuatan keputusan kebijakan akan tetapi juga melibatkan pihak swasta atau *stakeholders* serta masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai untuk kemajuan dan kepentingan bersama serta mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.

2. *Collaborative Governance* adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi serta mendapatkan solusi dari permasalahan dengan cara melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yaitu dengan melibatkan pihak swasta serta masyarakat dalam pengambilan serta penyusunan kebijakan serta proses pelaksanaan suatu program yang dibuat dan disepakati bersama sehingga dapat berjalan dengan maksimal dan optimal agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan.
3. Program adalah sebuah produk dalam kebijakan pemerintah yang disahkan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan dan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

1.8 Definisi Operasional

Dalam *Collaborative Governance* terdapat beberapa macam indikator keberhasilan dalam kolaborasi diantaranya yaitu:

- 1) Jenis Struktur jaringan

Dalam struktur jaringan terdapat tiga kategori :

- a. *Self Governance* (Pemerintahan Sendiri)

- Pemerintah Desa Gemaharjo, PT.NESTLE dan masyarakat memiliki organisasi sendiri tanpa ada struktur organisasi khusus atau resmi yang dibentuk.

b. *Lead Organization* (Memimpin Pemerintahan)

- Pemerintah Desa Gemaharjo, PT.NESTLE dan masyarakat memiliki struktur organisasi yang dibentuk secara resmi dan Pemerintah Desa sebagai Leader.

c. *Network Administrative Organization* (Administrasi Jaringan Organisasi)

- Pemerintah Desa Gemaharjo, PT.Nestle dan masyarakat memiliki struktur organisasi sendiri tetapi pada ruang lingkup yang sama.

2) Komitmen terhadap tujuan

- Pemerintah Desa Gemaharjo berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tujuan dapat tercapai.
- PT Nestle berkomitmen untuk terus melakukan kerjasama sebagai penampung susu segar dari masyarakat.
- Masyarakat berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan peternakan dan membantu kelancaran dan terlaksananya program pemerintah dengan baik.

3) Adanya kepercayaan antar pihak

- Baik Pemerintah Desa, PT.Nestle dan masyarakat saling percaya satu sama lain untuk menjalankan program pengembangan ternak sapi perah.

4) Kejelasan dalam tata kelola

Terdapat beberapa macam jenis kejelasan :

a. *Boundary* (batas) dan *exclusivity* (kekhususan)

Adanya keterbatasan-keterbatasan tanggungjawab yang dilakukan masing-masing pihak.

b. *Rules* (Aturan)

Terdapat atauran khusus yang menjadi pedoman dalam kerjasama yang dilakukan.

5) akses terhadap kewenangan

- Semua pihak yang terlibat dalam pengembangan ternak sapi perah memiliki hak dan kewenangan yang sama baik Pemerintah Desa, PT.Nestle dan masyarakat.

6) Pembagian dalam akuntabilitas / responsibility

- Pemerintah Desa, PT.Nestle dan masyarakat mempertanggungjawabkan tugas yang sudah mereka jalankan pada pengembangan ternak sapi perah

7) Bertukar Informasi

- Informasi yang terdapat pada pengembangan ternak sapi perah dapat dengan mudah di akses oleh anggota maupun bukan anggota.

8) Mengakses sumberdaya

- Ketersediaan SDM
- Ketersediaan SDA
- Ketersediaan Financial

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pacitan, lebih tepatnya di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo. Desa Gemaharjo merupakan Desa yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Selain itu Desa Gemaharjo merupakan salah satu desa yang unggulan di Kabupaten Pacitan, hal tersebut dikarenakan Desa Gemaharjo memiliki beberapa program unggulan serta inovasi dari bidang pemerintahan, kewilayahan maupun kemasyarakatan. Di bidang kewilayahan ialah pengembangan sapi perah yang bekerjasama dengan pihak swasta dan beberapa inovasi di bidang lainnya. Dengan adanya beberapa inovasi tersebut mampu mengantarkan Desa Gemaharjo menjadi juara II lomba Desa tingkat Nasional pada tahun 2016 dan mampu bersaing dengan desa-

desa unggulan lainnya di Seluruh Indonesia, seperti yang tertulis dalam artikel Pacitanku.com (Diakses dari pacitanku.com).

1.9.2 Jenis Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Moleong (2014) “ Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara Holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah“. Sedangkan menurut Nazir (2013) dalam Umami & Hendarto (2014) “pendekatan Deskriptif merupakan suatu langkah dalam melakukan penelitian status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, maupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu tujuan dari pendekatan deskriptif tersebut ialah mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis serta faktual dan akurat yang menyangkut fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar kejadian yang sedang diteliti”. Metode ini cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini karena teknik pengumpulan datanya menggunakan hasil dokumentasi, wawancara, dan catatan lainnya yang bisa digunakan sebagai penunjang data dalam penelitian. Jadi dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses dan bentuk kolaborasi tersebut serta bisa berhasil dan berjalan dengan baik.

1.9.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data penelitian ini melalui hasil dokumentasi program kegiatan pemerintah Desa Gemaharjo Kabupaten Pacitan. Selain itu menggunakan catatan lapangan, wawancara dimana teknik wawancara ini didapatkan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kemudian dari wawancara tersebut didapatkan beberapa informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya dari dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya yang bisa di dapatkan melalui arsip resmi yang dimiliki pemerintah sebagai penunjang dalam penelitian yang bisa di gunakan untuk referensi.

Penelitian ini dilakukan didaerah dimana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah yang menjadi titik permasalahan penelitian. Sedangkan jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pengumpulan data di lakukan dari dokumentasi. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung melalui dokumentasi sumber-sumber tertulis seperti catatan, laporan, dan juga memo yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder sebagai data-data pendukung dalam sebuah penelitian.

1.9.4 Teknik Analisa data.

Teknik analisis data adalah menganalisis data yang sudah didapat kira-kira mana yang dapat mendukung dalam pengembangan membuat penelitiannya. Analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan pengelompokan (klasifikasi) data sama untuk mempermudah melakukan analisis. Langkah kedua, sebagaimana Moleong (2014) adalah melakukan deskripsi terhadap data atau informasi yang dihasilkan. Dimana yang dimaksud ialah dengan memberikan gambaran atau melakukan pendeskripsian terhadap informasi-informasi yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Ketiga, melakukan pemahaman terhadap data dengan menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan sehingga dapat dengan mudah mudah untuk dipahami. Terakhir, adalah membuat kesimpulan. Dalam kesimpulan tersebut berisi tentang ringkasan yang kemudian menjadi point-point penting dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.